

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Adrian Sutedi, 2017. *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Hartanto, J. Andi, 2014. *Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*, Surabaya: Laksbang Justitia.
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Ismi, Hayatul, 2017. *Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia*. Pekanbaru: Forum Kerakyatan.
- Ismaya, Samun, 2014. *Hukum Administarsi Pertanahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Isnur, Eko Yulian, 2019. *Tata Cara Mengurus Segala Macam Surat Rumah Dan Tanah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Irawan Soerodjo, 2019. *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*, Aekola Surabaya, Surabaya.
- Jimmy Jose Sembiring, 2014. *Paduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Visi Media, Jakarta.
- James Julianto Irawan, 2014. *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Limbong, Bernhard, 2017. *Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Lubis, Yamin, Mhd, Dkk., 2017. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung, Mandar Maju.
- Muwahid, 2016. *Pokok-Pokok Hukum Agraria Di Indonesia*. Surabaya: UINSunan Ampel Press.
- Murad, R., 2018. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni.
- Permadi, Iwan. 2017. *Unifikasi Dan Pluralisme Hukum Agraris*. Malang: Gunung Samudera.
- Ramadhani, Rahmat. 2018. *Hukum Agraria (Suatu Pengantar)*. Medan: UMSU Press.
- Rachman, Noor Fauzi.2021. *Land Reform dari Masa ke Masa*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

- Supriadi, 2015. *Hukum Agraria. Ed. 1. Cet. 6.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Sadyohutomo, Mulyono. 2016. *Tata Guna Tanah dan Penyerasian Tata Ruang.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setiabudi, Jayadi. 2017. *Tata Cara Mengurus Tanah Rumah Serta Segala Perizinannya,* Jagakarsa, Jakarta.
- Santoso, Urip. 2017. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif,* Surabaya: Prenada Media Group.
- Sutedi, Adrian. 2019. *Sertifikat Hak Atas Tanah,* Jakarta: Sinar Grafika.
- Tehupeiory, Aartje. 2016.
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabet.
- Syarief, Elza. 2020. *Menuntaskan Sengketa Tanah,* Jakarta : PT. Gramedia.

ARTIKEL DAN JURNAL

- Asmawati, 2014. Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *Jurnal Ilmu Hukum.*
- Anatami, Darwis, 2017. "Tanggung Jawab Siapa, Bila Terjadi Sertifikat Ganda Atas Sebidang Tanah." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol. 12, no. 1, pp. 1-17.
- Dewandaru, P.A., 2020. "Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda di Badan Pertanahan nasional" *Notarius*, Volume 13, Nomor 1.
- Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A., 2021. Kekuatan Hukum Akta Jual Beli yang Dibuat Oleh Camat dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan PPAT. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 905-916.
- Fatatun, I. D., 2016. Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.*
- Hidayat, Rozi A., 2016. Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Hutan. *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, VOL. 4 No.2.
- Kemalasari, A., 2015. Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah. *Diponegoro Law Journal*, 2(3), 1-11.
- Kaban, M., 2016. Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo. *Jurnal Mimbar Hukum.* Vol 28 No 3.

- Krisna P. I K., Dantes K. F., & Sudiatmaka K., 2020. Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem Terhadap Sengketa Pensertifikatan Tanah ditinjau Berdasarkan UU No 5 Tahun 1960/Undang-Undang Pokok Agraria di Desa Adat Padangbai (Studi Kasus Sengketa Pensertifikatan Tanah Antara PT ASDP dengan Desa Adat Padangbai), *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 3, No. 3, hlm. 220-229.
- Panget, Ardiles Eric., 2013. “Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Memiliki Sertifikat Hak Milik Ganda.” *Lex Administratum*, vol 1, No 3.
- Paranoto, B.I., 2020. “Upaya Hukum Penyelesaian Sertifikat Hak Atas Tanah Ganda di Kota Yogyakarta” *Media of Law Sharia*, volume 1, No 3.
- Putri S. S. W. N, Dantes K. F., & Sudiatmaka K., 2023. “Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, vol. 3, No. 3, hlm. 112-121.
- Rizqi, Andina Alfia. 2018. Perlimdumham Hukum Pemilik Sertifikat hak Atas Tanah Dalam Hal Terjadi Kesalahan Data Penerbitannya (*Studi Kasus Di kantor Pertanahan Kota Semarang*). *Notarius*, Vol 11 No 2.
- Ramadhani, R., 2021. Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(1), 31–40.
- Silviana, Ana, Semarang, 2014, Penerapan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, *Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. Vol. 33 N0.3.
- Sorongan, Ricardo J., 2015. “Dampak Yuridis Terhadap Penerbitan Sertifikat Ganda Oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). *Lex et Societatis*. Vol. III/No. 3/Apr/2015.
- Santoso, Urip., 2016. Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Perspektif*, Vol. XXI No. 3.
- Nurhayati, Yati., 2021. “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, Vol. 2, Issue 1, February 2021,13.

SKRIPSI

- Devi Erfamiati, Alifia, 2022. *Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Terhadap Kepemilikan Sertifikat Ganda di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem*. Mahasiswa Pendidikan Universitas Ganesha.
- Eko Romadhoni, Dimas, 2022. *Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih (Overlapping) Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Mediator Kantor Pertanahan Kota Semarang*. Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043*).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59*).

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

